

**AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM**

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

497-0357

2. Contract/Grant Number

497-C-00-98-00045-00

3. Publication Date

July 26, 2001

4. Document Title/Translated Title

Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia
(Review of Regulations & Laws about SME in Indonesia) (in Indonesian)

5. Author (s)

1. Paramita Prananingtyas
2.
3.

6. Contributing Organization (s)

Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

7. Pagination

44

8. Report Number

PEG 55

9. Sponsoring A.I.D. Office

ECG, USAID/Jakarta

10. Abstract (optional - 250 word limit)

This review focuses on five basic Indonesian laws pertaining to small and medium enterprises, reviews them in detail, puts them in comparative international perspective, and makes recommendations for their revision.

PENUTUP: Demikianlah beberapa saran dan masukan berkaitan dengan usaha-usaha untuk merevisi peraturan perundangan mengenai usaha kecil dan usaha menengah. Tidak ada tujuan untuk melakukan suatu hal yang bersifat menggurui ataupun memaksakan kehendak, namun yang dilakukan adalah sekedar memberikan masukan dan perbandingan pemikiran, dengan tujuan akhir untuk kemajuan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar di Indonesia. Karena apabila keempat kelompok usaha ini dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, maka niscaya ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap bantuan / hutang luar negeri dapat dikurangi. Beberapa hal yang layak untuk diperhatikan adalah untuk tidak memperlakukan setidaknya mengurangi perlakuan bahwa usaha kecil dan usaha menengah sebagai obyek. Harus segera dimulai untuk memposisikan usaha kecil dan usaha menengah sebagai subyek, apabila hal ini sudah dilakukan maka diyakini bahawa semua kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah kepada sektor usaha ini akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

11. Subject Keywords (optional)

1. Indonesia
2. Small & Medium Scale Enterprises
3. Legal reforms
4. SME laws & regulations
5.
6.

12. Supplementary Notes

13. Submitting Official

C. Stuart Callison, Chief of Party

14. Telephone Number

011-62-21-520-1047

15. Today's Date

4 October 2001

.....DO NOT write below this line.....

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD [] INV [] DUPLICATE []

**PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI INDONESIA**

Oleh

Paramita Prananingtyas, SH, LL.M¹

PENDAHULUAN

Sektor usaha kecil memiliki peran yang strategis baik secara ekonomi, sosial dan politis. Fungsi ekonomi usaha kecil karena ia menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Melalui produk-produk manufaktur maupun barang kerajinan usaha kecil menyumbang separoh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan sektor tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Keberadaan usaha kecil menjadi penting dalam perekonomian Indonesia menuju perubahan dari sektor pertanian menuju basis ekonomi non pertanian. Perubahan tersebut berlangsung sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada barang dan jasa, kesempatan kerja dan penghasilan yang lebih baik serta meningkatnya modal. Berkembangnya dinamika ekonomi masyarakat menuntut peran pemerintah untuk mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga diharapkan dapat terwujud cita-cita kearah peningkatan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Selama beberapa tahun terakhir ini, nampak bahwa sektor usaha kecil dan menengah merupakan sektor yang sanggup bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi yang

¹ Paramita Prananingtyas, SH, LL.M. adalah staf pengajar tetap dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah. Laporan ini dipresentasikan pada Seminar berjudul “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah” pada tanggal 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek Partnership for Economic Growth (PEG). PEG adalah sebuah proyek dengan dana USAID. Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.

berkelanjutan. Pada saat usaha-usaha besar dan para konglomerat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya, usaha kecil dan menengah tetap bertahan hidup dengan segala daya upayanya.

Usaha kecil dan menengah adalah sumber dari tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga secara langsung dan tidak langsung bermanfaat dalam mengurangi pengangguran, berperan pula dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi secara tidak langsung.

Fakta yang menunjukkan bahwa usaha kecil berperan dalam mengurangi pengangguran tampak pada data berikut, pada kurun waktu 1997 – 1999 jumlah tenaga kerja di bidang non pertanian adalah sebagai berikut, pada sektor usaha kecil meningkat dari 57.482.688 ke 57.965.368, sedangkan disektor usaha menengah mengalami penurunan dari 7.726.268 ke 7.009.393 dan pada sektor usaha besar menurun dari 392.635 ke 364.975.²

Sedangkan fakta yang menunjukkan berperannya usaha kecil dan menengah dalam hal sumbangannya pada pendapatan nasional tampak pada data berikut. Pendapatan Nasional Indonesia (termasuk gas dan bahan bakar minyak) ditahun 1997, 1998, 1999 adalah sebesar Rp.628 milyar, Rp.943 milyar, dan Rp.1.075 milyar.³ Pada tahun yang sama kontribusi dari usaha kecil untuk pendapatan nasional adalah Rp. 238 milyar (37,96%), Rp.368 milyar (40,89%) dan Rp.450 milyar (41,89%) dalam tiga tahun berturut-turut tersebut rata-rata kontribusi usaha kecil terhadap pendapatan nasional adalah sebesar 40,25 %.⁴ Sedangkan kontribusi usaha menengah pada pendapatan nasional adalah sebesar Rp. 124 milyar (19,76%), Rp.163 milyar (117,28%) dan Rp.188 milyar (17,4%) dengan total kontribusi pada pendapatan nasional rata-rata 18,17%.⁵ Sedangkan usaha besar kontribusinya pada pendapatan nasional untuk tiga tahun rata-rata adalah sebesar 42,35%.⁶ Dari data tersebut nampaklah bahwa kontribusi dan arti pentingnya keberadaan usaha kecil di Indonesia.

Undang Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam pasal 33 dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indonesia, yang akan lebih dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945.

² Data statistik Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 1999

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Asas demokrasi ekonomi tersirat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut “*dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi , produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat , maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan....*”

Demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bias juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagaian besar tenaga kerja.⁷ Dalam hal ini perusahaan besar tidak tergolong dalam bagian ekonomi rakyat, namun tidak berarti pula bahwa perkembangan ekonomi rakyat hanya ditujukan pada perbaikan golongan miskin, tetapi merupakan sistem yang menggerakkan perekonomian nasional.

Pemberdayaan usaha kecil menjadi semacam credo yang wajib dilakukan oleh Pemerintah. Namun banyak pihak yang secara aktif turut berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil,yaitu kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, swasta dan koperasi, para pihak ini dapat disebut sebagai mitra atau lembaga pendukung pemberdayaan usaha kecil.

Kenyataan bahwa usaha kecil belum mampu dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan antara lain karena usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat eksternal maupun internal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia maupun teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi pengembangannya. Kendala-kendala tersebut kemudian akan menimbulkan kendala-kendala lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah tersebut, yaitu :

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang (akses pasar) dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen.
4. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.

⁷ R.Maryatmo dan Y.Sri Susilo, *Kumpulan Tulisan, Dari Masalah Usaha Kecil Sampai Masalah Ekonomi Makro*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996, halaman 3

5. Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha kecil.⁸

Hal-hal ini masih ditambah dengan kendala-kendala yang bersifat eksternal, yaitu adanya iklim usaha yang kurang kondusif dan rendahnya kepedulian terhadap pembinaan usaha kecil.

Usaha kecil yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga
- e. Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana
- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi
- h. Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi
- i. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.⁹

Selain itu ada beberapa karakteristik lain yang sering kali dinilai sebagai kelemahan usaha kecil, yaitu :

- a. Intensitas perubahan usaha sering terjadi sehingga sulit untuk membangun spesialisasi atau profesionalisme usaha
- b. Ketidakstabilan mutu produk dan adanya sifat yang cenderung ingin mencari keuntungan jangka pendek sehingga seringkali sangat spekulatif, tiru meniru, situasi persaingan mengarah pada persaingan tidak sehat dan lain-lain sifat yang dapat merugikan usaha jangka panjang

⁸ Isono Sudoko, dkk, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Aditya Bakti, Bandung, 1995 , halaman 36

⁹ Ibid halaman 37

- c. Manajemen keuangan belum tercatat dengan baik dan belum ada perbedaan antara konsumsi rumah tangga dengan biaya produksi, usaha serta keterbatasan modal dan ketrampilan
- d. Adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga akumulasi modal tidak dapat tercipta melainkan tersebar diantara sanak saudara
- e. Memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas
- f. Kebanyakan usaha kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup, bukan usaha yang produktif.¹⁰

Karakteristik-karakteristik dari usaha kecil tersebut kemudian menjadi salah satu tolak ukur dalam menyusun program pembangunan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ingin dicapai , yaitu :

- a. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui :
 - pemulihan ekonomi melalui pengembangan mekanisme pasar yang berkeadilan
 - memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia
 - pemberdayaan rakyat melalui demokratisasi yang berkesinambungan
 - mengoptimalkan peran pemerintah dalam kerangka persaingan yang sehat dan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar
- b. Penumbuhan iklim berusaha yang kondusif bagi usaha kecil, menengah dan koperasi :
 - penyempurnaan peraturan perundang-undangan
 - moneter dan perbankan
 - fiscal
 - perdagangan
 - industri
 - investasi
 - pengembangan iklim lembaga kompetisi
 - penumbuhan kemitraan usaha
 - pembangunan otonomi daerah
 - peningkatan koordinasi
- c. Dukungan perkuatan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi melalui :

¹⁰ Ibid halaman 39

- dukungan keuangan dan pembiayaan
- peningkatan kualitas penyedia jasa pengembangan bisnis
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- peningkatan penguasaan teknologi
- peningkatan penguasaan informasi
- peningkatan penguasaan pasar
- pencadangan lokasi usaha
- perlindungan dari persaingan tidak sehat
- penataan kelembagaan
- pengembangan usaha¹¹

Salah satu sarana untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas adalah dengan membuat suatu kebijaksanaan (policy) dari Pemerintah yang bertujuan murni untuk pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia pada saat ini dirasakan masih kurang, khususnya dalam hal pertumbuhan usaha kecil dan meningkatnya usaha kecil menjadi usaha menengah, serta dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Salah satu faktor yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil adalah dari bidang perundang-undangan.

Secara umum usaha kecil dan menengah di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, terutama faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan usaha menengah. Faktor yang pertama adalah faktor over regulated, dimana peraturan perundangan yang ada tidak bisa diadaptasi oleh sektor-sektor informal (usaha mikro dan usaha kecil) yang kemudian secara tidak langsung akan menghambat perkembangannya. Faktor kedua adalah masalah birokrasi yang berlebihan yang mengakibatkan munculnya faktor ketiga yaitu biaya-biaya operasional yang tinggi, faktor keempat adalah lingkungan usaha yang tidak kompetitif dan faktor terakhir adalah terbatasnya akses pembiayaan.

Secara khusus akan dibahas mengenai perlunya suatu peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dimana diharapkan ide mengenai peraturan tersebut dapat bersifat deregulatif dari peraturan yang lama.

Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat menurut teori Radbruch, yaitu secara filosofis

¹¹ Ibid halaman 41-42

dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian.¹² Sedangkan menurut Pound suatu undang-undang harus berfungsi sebagai “*tool of social control* “ dan “*tool of social engineering*”.¹³

Perundang-undangan adalah suatu gejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai factor kemasyarakatan lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan tertentu , dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu pada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.¹⁴

Suatu perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat kontrol sosial undang-undang tersebut akan melindungi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dari kondisi-kondisi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Sedangkan sebagai alat rekayasa sosial diharapkan undang-undang tersebut akan makin menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia, sebagai dasar makin berkembangnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai tiang ketiga pembangunan perekonomian bangsa.

Sudah sejak beberapa lama pemerintah Indonesia telah *mempunyai* komitmen untuk memberikan perhatian kepada pembangunan usaha kecil, menengah dan koperasi. Namun kebijakan pengembangan usaha kecil tidak bisa lepas dari kebijakan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh efek globalisasi. Perpaduan antara kebijakan pemerintah yang khas dan perkembangan teori pembangunan internasional cenderung melahirkan dualisme kebijakan pembangunan ekonomi. Dualisme kebijakan ini terlihat dari beberapa dikotomi seperti pertumbuhan versus pemerataan, modern versus tradisional, perkotaan versus pedesaan, industri versus pertanian, intervensi langsung pemerintah versus orientasi mekanisme pasar ,serta pengembangan usaha skala kecil versus usaha besar. Secara

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman 35

¹³ Ibid

¹⁴ Laboratorium Hukum FH UNPAR , *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 halaman 2

konsepsional dapat dilihat pertentangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi lembaga pemerintah dan sektor swasta dan koperasi.¹⁵

Program-program yang dijalankan pemerintah untuk pengembangan usaha kecil dilakukan secara bertahap dan seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang telah diambil terlebih dahulu yang berdampak merugikan usaha kecil. Dampak negatif dari diberlakukannya program-program yang bersifat tambal sulam adalah ketidaksinambungan dan ketidakkonsistenan dari peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pada akhirnya tujuan yang diinginkan dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tidak tercapai, yang ada hanyalah tumpukan perundang-undangan.

Hingga saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk undang-undang, keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dari berbagai departemen, yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah. Peraturan-peraturan tersebut rata-rata bertujuan sama, untuk memberdayakan, menumbuhkembangkan dan membina usaha kecil dan menengah. Selain itu ada terdapat pula beberapa peraturan yang tidak secara langsung mengatur usaha kecil dan menengah, namun berkaitan untuk mengatur individu-individu manusia, seperti peraturan tentang perpajakan, perautran tentang bentuk badan usaha, dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya upaya-upaya pembinaan dan pengembangan yang ingin dicapai melalui peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut sulit untuk dicapai. Apakah kesalahan terletak pada peraturan yang telah ada sehingga tidak bisa diterapkan dan tidak bisa mencapai tujuannya sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial. Ataukah kesalahan pada individu-individu yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

REVIEW PERUNDANG – UNDANGAN

Secara khusus akan dibahas 5 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah, yaitu :

1. Undang Undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. Peraturan Pemerintah no 44 tahun 1997 tentang Kemitraan
3. Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Instruksi Presiden no 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

¹⁵ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, halaman 24

5. Peraturan Pemerintah no 38 tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Akan dibahas peraturan-peraturan tersebut satu persatu .

1. Undang Undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang undang ini diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tanggal 25 Desember 1995

UU no 9 tahun 1995 terdiri atas 11 bab dan 38 pasal.

Bab I , mengenai ketentuan umum, terdiri atas 1 pasal 8 ayat, yang menerangkan mengenai definisi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, pemberdayaan, iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan, pinjaman dan kemitraan, secara ringkas.

Bab II, terdiri atas 3 pasal mengenai landasan, asas dan tujuan dari pemberdayaan usaha kecil.

Bab III, terdiri atas 1 pasal mengatur tentang kriteria usaha kecil berdasarkan kekayaan bersih , penghasilan tahunan, kepemilikan, kemandirian, bentuk usaha.

Bab IV, terdiri atas 8 pasal yang mengatur mengenai iklim usaha, dimana pemerintah akan menetapkan peraturan dan kebijaksanaan yang mendukung pertumbuhan iklim usaha, dan usaha tersebut harus didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bab V, terdiri atas 7 pasal, mengatur mengenai pembinaan usaha kecil yang akan dilakukan oleh pemerintah , dunia usaha dan masyarakat.

Bab VI, terdiri atas 6 pasal, mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan bagi usaha kecil, bentuk-bentuk pembiayaan, peningkatan akses ke pembiayaan dan lembaga penjaminan.

Bab VII, terdiri atas 7 pasal, mengenai kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha kecil, bentuk kemitraan, pola-pola kemitraan dan pembatasan hubungan kemitraan.

Bab VIII, terdiri atas 1 pasal mengenai koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha kecil melalui kendali seorang menteri, pembentukan lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha kecil, penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pemberdayaan usaha kecil.

Bab IX, terdiri atas 2 pasal, mengenai ketentuan pidana apabila menyalahgunakan status usaha kecil.

Bab X terdiri atas 1 pasal, mengenai sanksi administratif, kepada usaha menengah dan usaha besar yang melanggar pasal mengenai kemitraan dengan menguasai usaha kecil yang menjadi mitranya serta ancaman pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang menyalahgunakan status usaha kecil.

Bab XI, terdiri atas 2 pasal mengenai ketentuan penutup, yang tidak mencabut peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai usaha kecil sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan mengenai masa berlaku efektif dari undang-undang ini.

Pembahasan mengenai undang-undang ini akan dilakukan perbab.

a. Pembukaan

Pada bagian pembukaan suatu undang-undang akan terdiri beberapa hal yang wajib ada dalam pembukaan, namun yang penting untuk dibahas adalah mengenai konsiderans (menimbang), dasar hukum (mengingat). Konsiderans harus memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan perundang-undangan, alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan tujuan dan asas dari peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran harus mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis terakhir pada alasan yuridis.¹⁶

Pada UU no 9 tahun 1995 telah memuat dasar filosofis, latar belakang sosiologis serta alasan yuridis dalam penyusunan UU ini.

Bagian mengingat dari suatu undang-undang memuat dasar hukum positif bagi pembuatan undang-undang. Termasuk didalam ini adalah peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibuatnya undang-undang. Yang dimuat dalam dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sama derajatnya. Suatu Ketetapan MPR tidak dapat menjadi dasar hukum kecuali jika perintah dibentuknya suatu undang-undang berasal dari Ketetapan MPR.

b. Bab I

Terdiri atas 1 pasal yang merupakan pasal definisi. Dalam pasal disebutkan mengenai definisi usaha kecil, namun tidak disebutkan dengan pasti definisi untuk usaha menengah dan usaha besar. Yang kurang disebutkan pula dalam pasal ini

¹⁶ Laboratorium Hukum FH UNPAR, loc.cit halaman 22

adalah mengenai definisi usaha mikro sebagai bagian tersendiri yang lebih kecil dari usaha kecil. Serta ada kesalahan yang semoga hanya kesalahan cetak dalam pasal 1 point 7 “ *Pinjaman adalah pemberian jaminan....* “ Seharusnya adalah Penjaminan adalah pemberian jaminan.....

c. Bab II

Bagian ini terdiri atas 3 pasal ,mengenai landasan, asas dan tujuan pemberdayaan usaha kecil. Ketiga hal tersebut dipisahkan dalam 3 pasal , yang sebenarnya dapat dipadatkan menjadi hanya 2 pasal saja. Landasan dan asas dapat dimuat dalam satu pasal yang terdiri atas 2 ayat. Kemudian tujuan pemberdayaan dimuat dalam pasal yang berikutnya. Tujuan dari pemberdayaan sebaiknya tidak langsung pada pemberdayaan usaha kecil menjadi mandiri untuk kemudian dapat berkembang menjadi usaha menengah. Karena untuk membuat suatu usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh adalah suatu proses dan perjuangan yang berat. Seyogyanya tujuan utama adalah untuk membuat usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Kemudian apa yang tercantum dalam point b menjadi tujuan kedua, baru kemudian tujuan untuk membuat usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha menengah adalah tujuan yang paling akhir.

d. Bab III

Pasal 5 adalah bagian yang paling penting dari UU ini, karena dalam pasal ini tercantum kriteria dari apa yang dimaksud dengan usaha kecil di Indonesia. Terdapat 5 kriteria untuk usaha kecil, yaitu :

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-
3. milik warga negara Indonesia
4. berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki ,dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
5. berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi

Mengenai kriteria kekayaan bersih,dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan ,agak sedikit sulit untuk mengeceknya,karena akan dibutuhkan seorang ahli untuk dapat menaksir jumlah kekayaan bersih seorang pengusaha setelah dikurangi

tanah dan bangunan tempat usaha, sesuai dengan harga pasar saat itu. Jasa seorang penilai seperti itu jika harus ditanggung oleh pengusaha kecil pastilah berat. Perlu dipikirkan jenis penilaian lain yang dapat dipakai untuk menentukan kriteria usaha kecil.

Mengenai omzet atau hasil penjualan tahunan, ada pemikiran bahwa batasan jumlah omzet sebaiknya diperbesar dengan mengingat pengaruh-pengaruh depresiasi rupiah. Penilaian untuk penentuan usaha kecil dengan menggunakan omzet lebih efektif daripada penilaian menggunakan kekayaan bersih.

Hal berikutnya dari criteria adalah kepemilikan yang disyaratkan hanya milik warga negara Indonesia. Ketentuan ini dengan mengingat pengaruh globalisasi dan tekanan masyarakat internasional (WTO), maka akan sulit diterapkan karena pasti akan banyak pengusaha asing yang mendirikan usahanya di Indonesia dengan bekerjasama dengan warganegara Indonesia.

Sedangkan untuk ketentuan kemandirian usaha kecil, hal ini perlu untuk diteruskan, sebagai jaminan usaha yang lebih besar tidak mendapatkan fasilitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan untuk usaha kecil.

Demikian juga dengan jenis badan usaha, kriteria yang ada sudah tepat.

Sebenarnya ada suatu tambahan kriteria yang lebih bisa dipakai untuk pengelompokan jenis usaha yaitu dengan memakai jumlah tenaga kerja yang dipakai oleh suatu usaha.

Yang paling krusial dari pasal 5 terdapat pada ayat 2 "*criteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan b , nilai nominalnya dapat dirubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang datur dengan Peraturan Pemerintah.*

Masalah timbul karena Peraturan Pemerintah seperti yang dimaksud tidak pernah ada dan terlalu banyak kriteria untuk usaha kecil yang sudah diterbitkan oleh departemen teknis dan instansi terkait.

Masalah definisi dan criteria adalah masalah yang sangat krusial karena kedua hal tersebut mempunyai arti penting antara lain dalam hal kaitannya dengan hukum administrasi (hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan,dll), dan untuk menghindari overlapping pengaturan khususnya dalam masalah perijinan dan birokrasi lainnya.

e. Bab IV

Bab ini mengatur mengenai iklim usaha, melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.

Ada beberapa hal penting yang seharusnya juga dimasukkan dalam penumbuhan iklim usaha yaitu dalam hal perlindungan hukum, yang secara khusus diberikan porsi tersendiri.

Disebutkan bahwa dunia usaha dan masyarakat berperan aktif, namun ada pihak yang belum disebutkan padahal pihak tersebut adalah pihak yang paling berperan, yaitu aparat pemerintah.

Aspek pendanaan, mengapa tidak dipakai saja istilah yang seragam yaitu pembiayaan karena dalam undang-undang yang sama telah disebutkan mengenai pembiayaan.

Mengenai aspek persaingan, Pemerintah sudah mengeluarkan UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun dalam undang-undang tersebut ada satu pasal yang mengecualikan berlakunya undang-undang ini untuk usaha kecil. Memang benar bahwa usaha kecil harus dilindungi dari upaya persaingan yang tidak wajar, penguasaan pasar dan pemusatan pasar yang akan merugikan posisi usaha kecil. Namun tidak tertutup kemungkinan suatu usaha kecil juga akan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam praktek monopoli, oligopoly, monopsoni dan persaingan usaha tidak sehat lainnya. Jadi proteksi yang berlebihan terhadap usaha kecil hanya akan membuatnya kurang mandiri dan tidak tangguh dalam menghadapi persaingan usaha.

Aspek prasarana yang disebutkan dalam pasal 9 tidak menyebut dengan jelas jenis apa yang akan disediakan oleh pemerintah yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil. Beberapa hal yang disebutkan dalam pasal 13 sebenarnya dapat menjadi bagian dari pasal 9, seperti peruntukkan tempat usaha, pemberian lokasi. Yang termasuk juga dalam prasarana sebenarnya adalah juga kemudahan-kemudahan dari pemerintah dalam hal perpajakan, subsidi, dll.

Aspek informasi yang kurang termuat dalam pasal ini adalah mengenai dapat dimanfaatkannya secara maksimal jaringan informasi milik pemerintah yang tersebar diseluruh dunia (kedutaan besar) oleh dunia usaha dan adanya badan khusus yang akan menangani hal ini.

Aspek berikutnya adalah mengenai kemitraan, berkaitan dengan pasal 11 huruf b, harus diperhatikan dengan tegas perlunya pencegahan terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam praktek kemitraannya. Siapa yang berkewajiban untuk mencegah hal tersebut.

Aspek perijinan sudah cukup jelas.

Aspek perlindungan, sebenarnya lebih tepat jika disebutkan mengenai aspek perlindungan hukum. Dalam aspek ini perlindungan hukum tidak sekedar menjadi embel-embel tetapi menjadi perhatian utama. Contoh jelas adalah dalam perlindungan akan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), perlindungan dalam praproduksi, proses produksi dan pasca produksi dalam program kemitraan dan perlindungan usaha kecil dalam setiap upaya penyelesaian sengketa, perlindungan dalam sengketa perpajakan dan ketenagakerjaan. Karena perlindungan hukum tidak hanya sekedar sebagai upaya advokasi (konsultasi hukum dan pembelaan) namun lebih dari itu, perlindungan hukum dapat memberikan ketenangan berusaha bagi para pengusaha.

f. Bab V

Bab ini mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil, yang meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Ada satu hal yang terlupakan yaitu pembinaan dan pengembangan pendirian usaha kecil. Jadi upaya pembinaan dan pengembangan dapat dimulai sejak seseorang ingin mulai mendirikan usahanya.

Hal lain yang seharusnya ada dalam upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah dalam hal pemahaman mengenai hukum, agar para pihak sadar akan hak dan kewajibannya dalam suatu kontrak bisnis.

g. Bab VI

Bab ini mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan. Disebutkan jenis pembiayaan yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah melalui kredit perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Ada beberapa hal yang dapat diatur dalam pasal ini yang dalam prakteknya akan berbalik menjadi bumerang bagi pengembangan usaha kecil, yaitu disediakannya penyisihan dana dari sebagian laba BUMN.

Akan lebih baik jika untuk penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan usaha menengah adalah dengan lebih memanfaatkan modal ventura. Dalam prakteknya modal ventura tidak hanya akan sekedar memberikan uang tetapi akan terjun langsung dalam pengelolaan perusahaan, karena sifat pembiayaannya adalah penyertaan. Dana penyisihan sebagian laba tersebut dapat diberikan kepada perusahaan modal ventura dalam bentuk pinjaman atau penyertaan pemerintah.

Hal berikutnya adalah penjaminan, tidak begitu jelas dan tegas apa maksud untuk diadakannya lembaga penjaminan tersebut, apakah untuk kepentingan pemberi kredit agar kreditnya dapat kembali ataukah untuk kalangan penerima kredit agar mereka tidak usah khawatir jika hutangnya tidak dapat dilunasi akan ada pihak yang menjamin pelunasan hutangnya.

h. Bab VII

Bab yang mengatur mengenai kemitraan ini sebenarnya adalah bab yang mubazir, karena seharusnya sudah cukup dengan penyebutan dalam pasal 6 dan pasal 11. Hal-hal yang disebutkan dalam pasal 26 – pasal 32 seharusnya lebih baik disebutkan dalam peraturan pemerintah mengenai kemitraan.

i. Bab VIII

Dalam pasal 33 mengenai koordinasi dan pengendalian disebutkan bahwa akan ditunjuk seorang menteri yang membidangi usaha kecil yang bertanggung jawab atas serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan usaha kecil. Dengan tugas yang berat itu selayaknya disebutkan pula bahwa kementerian tersebut adalah kementerian yang sifatnya teknis tidak sekedar pembuat kebijaksanaan, terutama dengan mengingat penerapan otonomi daerah.

Mengenai koordinasi dan pengendalian seharusnya ada wewenang yang lebih besar pada menteri yang dimaksud agar posisi tawarnya “diatas” menteri-menteri lain, sehingga pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dapat maksimal.

j. Bab IX

Mengenai ketentuan pidana diatur dalam pasal 34 dan 35. Namun dalam pasal ini hanya mengenai pengusaha yang memakai kedok sebagai usaha kecil untuk dapat memakai semua fasilitas dan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk usaha kecil. Sulit untuk pembuktian dalam hal apakah usaha tersebut sudah masuk kriteria yang tepat atau tidak.

Hal lain yang kurang dari bab ini adalah tidak ada suatu aturan yang menentukan pidana bagi para pihak yang bertindak menghambat, mengurangi atau menolak upaya-upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan usaha kecil.

k. Bab X

Untuk sanksi administrative, ada 2 pasal untuk 2 hal yang berbeda yaitu untuk perusahaan yang melanggar pasal mengenai kemitraan dan untuk tindak pidana yang memakai fasilitas usaha kecil secara tidak sah. Sekali lagi sulit pembuktiannya untuk klasifikasi jenis usahanya.

l. Bab XI

Ketentuan penutup menyatakan bahwa seluruh peraturan yang berkenaan dengan usaha kecil sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini tidak akan dicabut. Hal inilah yang dikemudian hari menimbulkan tumpang tindih peraturan, karena ada beberapa peraturan yang bersifat mendua dan tidak konsekuen.

2. **Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1997 tentang Kemitraan**

Peraturan pemerintah ini dibentuk untuk memfasilitasi UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, khususnya bab VII tentang kemitraan.

PP ini terdiri atas 7 bab dan 30 pasal.

Akan dibahas satu persatu bab-bab yang ada dalam PP ini, yaitu :

a. Bab I tentang ketentuan umum, terdiri atas 1 pasal dan 6 point.

Pada bab ini diberikan mengenai definisi dari kemitraan. Dari definisi tersebut akan diketahui unsure-unsur penting dari kemitraan yaitu :

- Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.
- Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraan bersama.

- Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha kecil, yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan kemampuan SDM, pembinaan manajemen produksi, dll.
- Prinsip saling memerlukan, saling memperluas dan saling menguntungkan, yang akan terjalin karena para mitra akan dan saling memperkenalkan posisi keunggulan dan kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada efisiensi dan turunnya biaya produksi . Karena kemitraan didasarkan pada prinsip win-win solution partnership, maka para mitra akan mempunyai posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan , tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitas satu dan yang lain dan tumbuhnya rasa saling percaya diantara mereka.

Yang belum dan kurang disebutkan secara tegas dalam PP ini adalah ketentuan mengenai kesetaraan dan kedudukan yang sejajar dari para pihak, khususnya dari mitra usaha kecil. Hal ini penting agar usaha kecil tidak tereksplorasi oleh pihak usaha besar/ usaha menengah yang menjadi mitra.

b. Bab II tentang pola kemitraan, terdiri atas 7 pasal .

Pola-pola kemitraan yang diatur dalam bab ini mengacu pada pola-pola kemitraan yang ada dalam UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Secara khusus hanya disebutkan mengenai pelaksanaan pola inti plasma, pola subkontrak, pola waralaba, pola dagang umum. Dengan pembahasan mengenai pola inti plasma dan pola subkontrak lebih terperinci dari pola yang lain. Seharusnya pembahasan mengenai pola-pola tersebut dalam porsi yang sama antara satu dan lainnya.

Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimintakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha.

Dari pasal tersebut tidak nampak jelas peran pemerintah dalam membantu pelaksanaan program kemitraan. Seyogyanya ditambahkan ketentuan bahwa pihak pemerintah yang akan mengelompokkan usaha kecil dalam jenis-jenis

kemitraan tertentu dan pihak pemerintah akan membantu dalam usaha melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak usaha besar atau usaha menengah.

c. Bab III tentang iklim usaha dan pembinaan kemitraan terdiri atas 11 pasal.

Bab ini adalah bab yang paling penting dari PP ini karena akan menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan.

Pasal 9 menyebutkan bahwa menteri dan menteri teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan berusaha. Keleluasaan para menteri dan menteri teknis untuk menetapkan kebijakan akan menimbulkan saling tumpang tindih peraturan, yang kemudian menyebabkan inefisiensi peraturan.

Pasal 11 mengatur mengenai insentif yang akan didapat jika usaha besar atau usaha menengah melakukan kemitraan. Insentif memang diperlukan agar suatu program dapat sukses. Masalahnya adalah insentif-insentif tersebut dapat disalahgunakan oleh usaha besar, khususnya insentif huruf b.

Pasal 17 tentang tugas-tugas dari Menteri, Menteri teknis, dan KADIN dalam menginformasikan peluang-peluang kemitraan. Seharusnya tugas-tugas tersebut dapat ditambahkan dengan kewajiban menteri, dan menteri teknis untuk melakukan “lamaran/pinangan” kepada pihak usaha besar /usaha menengah atas nama usaha kecil.

Pasal 18 dan penjelasan pasal 18 adalah mengenai perjanjian kemitraan. Disebutkan bahwa perjanjian tersebut berbentuk tertulis, dalam bahasa Indonesia, atau bahasa lain, dapat dibawah tangan atau dengan akta notaris, dan sekurang-kurangnya memuat

- nama
- tempat kedudukan masing-masing pihak
- bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan
- pola kemitraan yang digunakan
- hak dan kewajiban masing-masing pihak
- jangka waktu berlakunya kemitraan
- cara pembayaran
- bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar dan usaha menengah
- cara penyelesaian perselisihan

Kemudian dalam pasal 19 disebutkan bahwa menteri atau menteri teknis memberikan bimbingan atau bantuan lain yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan. Dalam penjelasan pasal 19 disebutkan bahwa bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Namun dalam kenyataannya tidak ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian atau persyaratannya, karena perjanjian tersebut telah dibuat atau dicetak oleh pihak mitra usaha besar/usaha menengah. Padahal pihak mitra usaha kecil juga mempunyai hak dalam ikut menentukan isi perjanjian kemitraan.

Sebenarnya pasal-pasal tersebut merupakan upaya mencegah penyalahgunaan posisi dominan dari salah satu pihak. Dengan adanya perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak mitra usaha besar/usaha menengah maka sudah ada perjanjian baku untuk kemitraan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.¹⁷ Penggunaan perjanjian baku dalam bisnis adalah hal yang lajim untuk dilakukan karena perjanjian tersebut dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat. Penggunaan perjanjian baku ada sisi positifnya, yaitu efisiensi dari segi waktu, biaya dan bagi pihak yang disodori perjanjian baku tersebut jika dia orang awam tidak menjadi masalah karena tidak dibutuhkan keahlian di bidang hukum.¹⁸

Jika dilihat dari substansi perjanjian kemitraan nampak bahwa pemerintah telah memberikan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian tersebut. Unsur-unsur pokok yang sebaiknya ada dalam perjanjian kemitraan dapat dikatakan sebagai standar perjanjian yang merupakan wujud campur tangan pemerintah, yang hanya akan bersifat formil

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 halaman 271

¹⁸ Retno Saraswati, *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Broiler) Pada Program Kemitraan Usaha*, Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, UNDIP, Semarang, 2001, halaman 187

saja dimana substansi perjanjian tetap tergantung pada para pihak. Dengan adanya standar tersebut diharapkan dalam hubungan kemitraan ada transparansi. Namun pedoman-pedoman seperti yang diatur dalam pasal 18 dan penjelasannya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Yang diatur hanya unsure-unsur pokok dalam perjanjian kemitraan yang hanya bersifat sebagai pedoman dan bukan keharusan karena dalam PP no 44 tahun 1997 tidak memuat sanksi apabila suatu perjanjian kemitraan tidak memuat unsure-unsur pokok tersebut.¹⁹

d. Bab IV tentang lembaga pendukung, yang terdiri atas 3 pasal.

Lembaga pendukung untuk program kemitraan terdiri atas lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan lembaga pendukung lain.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ditujukan kepada usaha kecil yang melakukan program kemitraan, namun tidak disertai dengan upaya-upaya pengawasan pelaksanaan.

Untuk lembaga penjaminan, sama seperti yang disebut dalam UU Usaha Kecil, mengenai lembaga penjaminan belum dibahas secara terperinci.

Lembaga lain yang seharusnya ada namun tidak disebutkan secara jelas adalah lembaga bantuan hukum, karena lembaga pendukung ini sangat penting dalam rangka perlindungan bagi para pihak sejak masa pra operasional / pra produksi (negosiasi isi perjanjian), masa produksi, pasca produksi (termasuk didalamnya masalah perlindungan HAKI).

e. Bab V tentang koordinasi dan pengendalian yang terdiri atas 6 pasal.

Koordinasi yang dilakukan oleh Menteri dan Menteri teknis adalah mengenai pelaksanaan program kemitraan nasional. Tidak disebutkan mengenai siapakah yang akan mengawasi pelaksanaan di lapangan, mengenai posisi kedua pihak agar tetap sejajar dan seimbang tanpa ada salah satu pihak yang dieksploitasi.

f. Bab VI tentang ketentuan peralihan terdiri atas 1 pasal.

Pasal 29 menyebutkan bahwa dengan adanya PP ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan hubungan kemitraan yang bertentangan dengan PP ini dinyatakan tidak berlaku.

¹⁹ Ibid

Untuk mengantisipasi hal ini seharusnya pasal-pasal tentang kemitraan yang ada dalam UU Usaha Kecil dapat dimasukkan dalam PP ini.

- g. Bab VII tentang ketentuan penutup terdiri atas 1 pasal.

3. **Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil**

PP ini terdiri atas 6 bab dan 23 pasal.

PP ini dibuat sebagai kelanjutan dari amanat UU Usaha Kecil, seperti disebutkan dalam konsiderans dan dalam dasar hukum pembentukan PP.

- a. Bab I, tentang ketentuan umum, yang berisikan definisi-definisi tentang apa yang diatur dalam PP ini. Kriteria yang dipakai adalah tetap kriteria yang ada pada UU no 9 tahun 1995, yang membutuhkan untuk direvisi.

Pemberdayaan yang ingin dilakukan dalam PP ini adalah untuk menumbuhkan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan agar usaha kecil dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Masalah yang sama, karena upaya-upaya agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri adalah upaya yang cukup sulit, sehingga upaya untuk menjadikannya usaha menengah sebaiknya tidak dijadikan target utama.

- b. Bab II, tentang lingkup, tata cara dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan. Terdiri atas 13 pasal dan merupakan inti dari PP ini.

Namun ada satu pasal yang berpotensi untuk menghambat pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil, yaitu pasal 5.

Pasal 5 menyebutkan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil,
- b) penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil,
- c) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan,
- d) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Jika proses pembinaan dan pengembangan harus dimulai dari hal-hal tersebut diatas maka akan memakan banyak waktu dan biaya, padahal dunia usaha membutuhkan gerakan /action yang cepat dan tepat.

Lebih penting lagi adalah dimasukkannya pembinaan dan pengembangan yang mendorong proses berdirinya suatu usaha kecil (start up process) dan bagaimana menjaga kelangsungan hidup usaha kecil tersebut.

- c. Bab III, terdiri atas 4 pasal, mengatur mengenai lembaga pendukung . Lembaga pendukung terdiri atas lembaga pembiayaan, lembaga penjamin dan lembaga pendukung lain. Untuk lembaga pembiayaan sebenarnya melalui PP ini dapat ditekankan penggunaan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan utama untuk pengembangan usaha kecil. Karena sifat pembiayaan melalui modal ventura suatu usaha tidak semata-mata pemberian pinjaman atau hibah tetapi juga ada unsur penyertaan. Harus diupayakan kondisi dimana penyertaan untuk modal ventura tidak hanya terbatas bagi usaha yang berbentuk badan hukum tetapi juga untuk usaha yang belum / tidak berbadan hukum dan penyertaan modal ventura untuk usaha kecil tidak hanya dengan bentuk pola bagi hasil.

Mengenai lembaga penjaminan harus diperjelas apa yang dimaksud dan bagaimana operasional serta konsekuensinya bagi usaha kecil.

Lembaga pendukung lainnya yang sangat perlu untuk disebutkan dan agak terperinci adalah lembaga bantuan hukum yang tidak hanya sekedar pemberian advokasi setelah adanya masalah sengketa tetapi juga pada saat awal pendirian suatu usaha kecil, yang akan membantu pemenuhan persyaratan hukum administrasi bagi usaha kecil (ijin pendirian, perpajakan), kemudian juga perlindungan akan aspek HAKI.

- d. Bab IV

Bab ini mengatur mengenai koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh menteri. Dengan posisi yang demikian penting, seharusnya disediakan posisi menteri tersebut dengan mempunyai wewenang memutuskan tidak hanya sekedar wewenang membuat kebijaksanaan tetapi tidak bisa memantau dalam pelaksanaan. Tidak lupa pula untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai otonomi daerah.

Perlu dipertegas adanya koordinasi yang baik antar departemen teknis dan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kebijaksanaan, yang pada akhirnya hanya memperpanjang alur birokrasi yang harus ditempuh oleh usaha kecil dalam rangka memperoleh pembinaan.

- e. Bab V, terdiri atas 1 pasal tentang ketentuan peralihan yang menyatakan tidak berlakunya perundang-undangan yang tidak sesuai dengan PP ini
- f. Bab VI, tentang ketentuan penutup terdiri atas 1 pasal tentang waktu berlakunya perundangan ini

4. **Instruksi Presiden no 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah**

Inpres ini dalam bagian pendahulunya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

Fungsi Inpres ini untuk memerintahkan kepada semua pejabat yang disebutkan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pemberdayaan usaha menengah. Sifat dari pemberdayaan melalui inpres ini adalah sistem top – down, kehandalan sistem ini biasanya tidak akan diikuti oleh praktek yang mulus di lapangan.

Akan lebih sesuai apabila sebelumnya telah ada suatu undang-undang yang didalamnya mengatur mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Untuk kemudian bagi masing-masing usaha tersebut dapat dibuat peraturan-peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang mendukung pembinaan , pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, maka pemerintah menerbitkan Inpres ini.

Dalam Inpres ini disebutkan berbagai macam tugas untuk berbagai macam instansi, dimulai dari tingkat departemen sampai dengan pemerintah kota dan kabupaten, dalam hal memberdayakan usaha menengah di bidang pembiayaan, pemasaran, teknologi, sumberdaya manusia, perijinan, pengembangan ekspor , penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Terdapat beberapa kekurangan substansial yaitu adanya Diktum IV yang mengizinkan para menteri dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya untuk menetapkan kriteria usaha menengah, yang akan menyebabkan kemunduran karena akan ada banyak criteria mengenai usaha menengah yang kemudian akan menyulitkan kondisi perkembangan usaha menengah itu sendiri.

5. **Peraturan Pemerintah no 38 tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

PP ini terdiri atas 5 bab dan 6 pasal, yang merupakan dasar atas berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani dengan tujuan untuk menyelenggarakan jasa pembiayaan dan jasa manajemen dan kegiatan lain untuk mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Masalah utama dari PP ini sudah nampak pada bagian pendahuluan PP.

Pada konsiderans seharusnya berisi pokok-pokok pikiran yang mendasari pembuatan, alasan pembuatan dan tujuan serta asas dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam PP ini dalam bagian menimbang telah ada dasar hukum sebagai pertimbangan pendirian Persero PNM.

Pada bagian mengingat seharusnya memuat dasar hukum positif bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, namun dalam PP ini ada beberapa peraturan mendasar yang tidak dijadikan bagian dari pendahuluan PP, yaitu UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

PP ini hanya memuat mengenai pendirian PT Persero PNM, tidak memberikan rambu-rambu mengenai operasional perusahaan ini.

Modal perusahaan ini berasal dari APBN tahun 1998 / 1999 sebesar 300 milyar rupiah. Yang menjadi masalah mendasar dari peraturan pemerintah ini adalah apakah peraturan pemerintah ini sudah efektif berjalan? Dan apakah layak jika modal perseroan diambilkan dari APBN dalam kondisi negara yang sedang "sakit"? Apakah keberadaan peraturan pemerintah ini tidak akan semakin menggerogoti keuangan negara setelah ada kebijakan yang mengharuskan BUMN menyisihkan sebagian laba untuk disalurkan kepada usaha kecil.

Sebenarnya usaha kecil dan menengah tidak semata-mata membutuhkan dana dalam arti modal, tetapi kemudahan dalam memulai usaha dalam hal birokrasi yang tidak berbelit, murah, tepat waktu dan pejabat pemerintah yang tidak korup.

STUDI KOMPARATIF ²⁰

Usaha kecil dan menengah adalah suatu fenomena yang sama disetiap negara di dunia, mereka dipandang sebagai suatu organisasi bisnis yang penting dalam suatu negara, sama pentingnya dengan usaha besar dan para konglomerat.

Di negara-negara maju baik yang ada di Eropa, Amerika maupun Asia menyadari pengaruh besar dari adanya usaha kecil dan menengah di negara mereka. Usaha kecil dan

menengah berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja baru, penemuan-penemuan baru yang inovatif dan penguasaan atas teknologi yang lebih maju. Selain itu usaha kecil dan menengah juga penting bagi pembangunan regional dan kerjasama sosial. Tetapi terdapat masalah-masalah yang umum di negara-negara tersebut yaitu hanya 50% dari usaha kecil menengah yang ada yang sanggup untuk bertahan hidup lebih dari 5 tahun dan dapat berkembang menjadi lebih besar.

Negara-negara maju sadar bahwa diperlukan pendekatan yang baru dan lebih baik terhadap usaha kecil dan menengah agar dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa negara memberikan definisi terhadap usaha kecil dan menengah sebagai suatu usaha non subsidiari, merupakan badan usaha yang independen, selain itu kriteria khususnya adalah mengenai jumlah tenaga kerja, Uni Eropa memakai batasan usaha menengah dengan tenaga kerja antara 200 –250 orang, AS adalah 500 orang. Sedangkan untuk usaha kecil jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang dan usaha mikro antara 5 –10 orang. Selain kriteria jumlah tenaga kerja, kriteria lain adalah dari asset keuangan, dengan pendapatan tahunan 40 milyar euro atau penghitungan rugi laba kurang dari 27 milyar euro.

Jumlah usaha kecil dan menengah di negara-negara anggota OECD adalah yang terbanyak dibandingkan dengan jumlah usaha besar dan badan usaha milik negara, mereka beroperasi di bidang jasa, konstruksi, perdagangan baik grosir maupun eceran, hotel, restoran, perangkat lunak komputer dan informatika serta lembaga riset. Dengan jumlah yang besar tersebut maka usaha kecil dan menengah menciptakan peluang lapangan kerja lebih besar dari sektor usaha besar, di Uni Eropa usaha kecil dan menengah menyerap 2/3 kebutuhan akan tenaga kerja, di AS lebih dari 1/2 sektor kerja swasta sedangkan di Jepang 78% lapangan kerja tersedia di sektor usaha kecil dan menengah.

Rata-rata usaha kecil dan menengah yang berhasil kepemilikannya didominasi oleh generasi muda yang mau menerima pembaharuan dan memiliki jaringan kerjasama (networking) baik formal maupun informal. Kuncinya adalah adanya semangat kewirausahaan yang tinggi, yang akan memacu keberhasilan penciptaan lapangan kerja dan semangat inovasi.

Menyadari hal ini maka banyak pemerintah terutama di negara-negara anggota OECD yang mereformasi kebijaksanaan dan kondisi-kondisi yang menghalangi suatu usaha dalam penciptaan, perluasan usaha dan akses untuk memulai atau berganti jenis usaha.

²⁰ Disarikan dari *OECD Small and Medium Enterprise Outlook*, OECD, Paris, 2000

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila akan merevisi peraturan perundang-undangan mengenai usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro. Hal-hal apa yang telah dilakukan di negara-negara anggota OECD mungkin bisa menjadi suatu contoh.

a. Semangat kewirausahaan

Semua usaha suatu pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah akan sia-sia tanpa adanya suatu semangat kewirausahaan. Semangat kewirausahaan adalah suatu naluri atas adanya kesempatan, suatu keberanian untuk mengambil risiko bisnis dengan mengembangkan sesuatu yang baru baik barang maupun jasa . Semangat kewirausahaan adalah hal yang misterius yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan politik suatu bangsa. Secara tidak langsung semangat kewirausahaan menentukan lahir, hidup berkembangnya serta matinya suatu usaha kecil dan menengah secara khusus dan ekonomi secara umum.

Kondisi ini disadari oleh pemerintah sehingga mereka dapat memfokuskan kebijaksanaan dan program untuk usaha kecil dan menengah dengan cara lebih meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan masyarakat pada umumnya dan para pengusaha pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kewirausahaan dan keberanian mengambil risiko bisnis adalah dari segi regulasi, pendidikan dan pelatihan.

b. Pendekatan dengan target

Pemerintahan suatu negara yang sudah dapat menghargai dan mengenal potensi usaha kecil dan menengah akan membuat suatu action plan dan pelayanan khusus bagi usaha kecil dan menengah. Dapat dilakukan dengan membuat suatu biro khusus dengan tugas untuk mempromosikan pertumbuhan usaha kecil dan menengah, biro-biro tersebut akan bertugas untuk hal-hal pemberian modal, pembaharuan pajak, mengurangi halangan administrasi, memperbaiki sistem informasi, pelatihan manajemen dan ketenagakerjaan, meningkatkan akses pasar. Hampir setiap negara memiliki biro khusus untuk usaha kecil dan menengah, sebagai contoh Uni Eropa memiliki BEST (Business Environment Simplification Task Force) yang bertugas memfasilitasi kepentingan usaha kecil dan menengah di bidang bisnis. Contoh lain adalah Norwegia dimana para menteri mengkoordinasikan kebijakan dan programnya melalui Action Plan for Small and Medium Enterprise dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kewirausahaan dan pendirian usaha kecil dan menengah.

Cara lain adalah dengan membagi wilayah kerja pembinaan usaha kecil dan menengah dengan mengutamakan target tertentu. Pembagian wilayah tersebut bisa berdasarkan sektor industri atau daerah tertentu. Hal penting lain adalah mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta dan antar usaha kecil dan menengah sendiri agar usaha kecil dan menengah tersebut tumbuh dengan dinamis.

c. Pembaharuan hukum

Keberadaan biro-biro dan kementerian khusus yang melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh peraturan-peraturan baik dibidang regulasi maupun finansial yang menarik dan kondusif bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang ditingkat lokal, regional dan internasional.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah berkaitan dengan hukum adalah karena regulasi-regulasi yang ada menempatkan usaha kecil dan menengah dibawah usaha besar, dimana peraturan tersebut lebih mengutamakan stabilitas usaha daripada fleksibilitas berusaha, dan karena terlalu banyak peraturan yang dibebankan kepada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah sulit untuk beradaptasi dengan peraturan-peraturan tersebut karena kurangnya dana dan kemampuan manajemen.

Jadi hambatan utama yang diakibatkan oleh hukum atau regulasi adalah adanya biaya persyaratan yang tinggi, formulir-formulir yang rumit dan peraturan yang menghambat aktifitas tertentu. Maka peraturan yang menghambat kreasi dan ekspansi usaha kecil dan menengah harus diperbaharui, persyaratan untuk pendirian usaha yang memakan waktu, biaya, kompleksitas dan persyaratan yang rumit harus dikurangi atau dihilangkan.

Ide yang ada adalah untuk mendirikan kantor terpadu untuk usaha kecil dan menengah yang berfungsi untuk penyediaan informasi dan fasilitas pendirian usaha (formulir dan administrasi) di satu tempat. Hal ini dilakukan dalam rangka menghilangkan birokrasi yang berbelit, hambatan birokrasi, prosedur pendirian yang panjang dan biaya yang terlalu tinggi.

d. Akses ke sektor keuangan

Usaha kecil dan menengah mempunyai kesulitan untuk memperoleh kredit dari perbankan karena pemilik ataupun manajer usaha kecil dan menengah kurang

memiliki pengalaman baik dibidang komersial dan atau tidak memiliki track record selaku pengusaha , sehingga oleh kalangan perbankan dianggap sebagai usaha yang terlalu berisiko dan akibatnya menjadi tidak menarik untuk dijadikan nasabah. Masalah lain adalah tidak adanya jaringan informasi antara investor dan pengusaha kecil dan menengah sehingga tidak diketahui apa yang dibutuhkan oleh usaha kecil dan menengah.

Beberapa negara memiliki program khusus dibidang keuangan untuk usaha kecil dan menengah, antara lain dengan cara mempermudah akses ke modal ventura (pemerintah dapat bertindak sebagai lembaga pembiayaan modal ventura untuk menyediakan dana bagi perusahaan kecil dengan risiko tinggi dengan tujuan untuk merangsang inovasi dan penyerapan tenaga kerja) dan sistem pembiayaan non pemerintah lain ; memacu perkembangan pasar modal sekunder untuk mempermudah investor keluar dan masuk berinvestasi ; mengurangi pajak untuk capital gain dan dividen ; memperbaharui peraturan perpajakan dan cara penghitungan pajak ; mempermudah kondisi investasi bagi dana pensiun dan organisasi lain.

e. Insentif pajak

Pajak sedikit banyak memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah . Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah melalui keringanan pajak dan insentif pajak, khususnya yang akan mendorong semangat kewirausahaan dibidang riset dan penemuan. Beberapa negara seperti Kanada, Australia, Swedia memberikan kemudahan dalam pengisian formulir perpajakan untuk usaha kecil dan menengah serta adanya harmonisasi /menghindari duplikasi penarikan pajak oleh pemerintah federal (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah. Beberapa peraturan perpajakan juga direvisi terutama yang pajak perusahaan, pajak capital gain, pajak pertambahan nilai dan instrumen-instrumen pajak lain yang menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah.

f. Mendorong semangat inovasi

Pemerintah mendorong penemuan-penemuan baru yang dapat dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah , dengan memberikan kredit atau hibah kepada mereka. Contohnya apa yang dilakukan di AS dengan Small Business Innovation Research, Australia dengan Core Swart award .

Selain dengan memberikan kredit dan hibah, usaha untuk mendorong semangat inovasi juga dilakukan dengan cara memberikan konsultasi teknik, sebagai contoh Denmark memiliki Technological Information Centres (TICs), Technological Development Centres (TEKMER) di Turki, Business Link di UK, Industrial Research Assistance Program (IRAP) di Kanada dan National Committee for Productivity and Technological Innovation (COMPTITE) di Mexico.

Cara lain untuk mendorong riset adalah dengan menjalin kerjasama dengan institusi riset lain termasuk dengan universitas dan pusat riset negara.

Yang lebih penting adalah melatih para manajer usaha kecil agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengadopsi teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka.

g. Perangkat elektronik

Semakin disadari bahwa informasi dapat diperoleh dengan cara yang semakin mudah dan semakin murah dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada aspek kompetisi suatu produk. Usaha kecil dan menengah juga menyadari manfaat tersebut dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta e-commerce untuk mencapai target pasar. E-commerce mempunyai kekuatan yang luarbiasa untuk memperbaiki kondisi tampilan suatu usaha kecil dan menengah serta memperluas pasar bagi produk mereka. Hubungan antara relasi bisnis dan dengan konsumen melalui e-commerce akan menjadi lebih luas, melewati batas nasional dan internasional serta dapat menhemat waktu dan biaya.

Namun masih banyak usaha kecil yang belum dapat memanfaatkan keunggulan e-commerce ini, disatu sisi hal tersebut disebabkan karena mereka belum sadar akan manfaat e-commerce, hal yang lain adalah karena sumberdaya perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang masih terbatas, karena biaya untuk mengakses dan memakai ICT bervariasi di setiap negara.

Pemerintah dari negara-negara anggota OECD telah melakukan beberapa hal sehubungan dengan ICT ini, khususnya pada tahun 1999 menjelang pergantian numeric tahun 2000, dengan melakukan asistensi pada usaha kecil dan menengah mengenai kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul karena Y2K dan dengan memperkenalkan mereka pada keunggulan dari e-commerce. Banyak pihak yang dilibatkan dalam hal ini, antara lain kamar dagang, organisasi dagang, dan pemerintah lokal.

Pemerintah Jerman mendirikan Centres of Competence for Electronic Commerce dan memprakarsai berdirinya Teleworking in Small Business. Swiss memberikan pelatihan khusus melalui skema Virtual Enterprise dan mempromosikan perangkat lunak pada para usaha kecil melalui Soft(net). Di Irlandia, Small Business Operational Programme (SBOP) dilibatkan dalam program pengenalan e-commerce tingkat nasional, termasuk didalamnya pendirian Irish e-commerce dan suatu organisasi internet yang melayani usaha kecil.

Jadi negara-negara OECD terus meliberalisasi pasar telekomunikasi mereka dan mendorong kompetisi pada tingkat ICT dalam hal infrastruktur, harga dan servis. Usaha-usaha selain meningkatkan akses usaha kecil dan menengah ke e-commerce, juga untuk memberikan pengetahuan mengenai *e-commerce privacy* dan perlindungan konsumen.

h. Pasar global

Usaha kecil dan menengah akan lebih banyak terlibat dalam perdagangan internasional pasar global melalui ekspor, penanaman modal asing, kerjasama bisnis internasional dan e-commerce. Cara-cara yang dipakai adalah dengan bekerja sama dengan usaha besar atau saling bekerjasama dengan sesama usaha kecil dalam usahanya untuk dapat menembus pasar internasional. Para pemerintah negara OECD sadar karena kondisi dari usaha kecil yang masih “kecil” maka akan sulit bagi mereka untuk dapat bersaing di pasar global. Maka dilakukanlah beberapa program untuk memperkenalkan usaha kecil dan menengah yang ada disuatu negara ke pasar global, antara lain dengan memperbaiki sistem informasi tentang pasar luar negeri dan memberikan bantuan dalam rangka ekspor .

Kantor yang melayani kredit ekspor telah dibentuk sebagai salah satu skema kredit ekspor khusus untuk usaha kecil yang akan melakukan ekspor, antara lain dengan pelayanan yang sangat luas dibidang keuangan dan manajemen risiko, termasuk didalamnya pendanaan, asuransi , bank garansi dan advis mengenai ekspor.

Banyak negara-negara OECD menyebarluaskan informasi mengenai pasar dan kesempatan ekspor , dengan memanfaatkan homepage dari para pengusaha kecil dan menengah dan melalui cara-cara elektronik lainnya. Sebagai contoh Kanada mendirikan ExportSource, suatu situs internet yang menyediakan informasi bagi para usaha kecil dan menengah yang melakukan ekspor. Mexico mendirikan Export Guidance System yang menyediakan penasehat-penasehat yang akan menerangkan

mengenai kesempatan melakukan ekspor dan prosedur ekspor bagi usaha kecil dan menengah. Korea mendirikan Export Support Centre, United Kingdom mendirikan Export Development Counsellor dan Belanda mempunyai Programme for New Businesses in Foreign Market.

Beberapa negara juga menyediakan dana khusus yang tidak berupa pinjaman untuk usaha kecil dan menengah agar dapat berpartisipasi dalam acara-acara ekspedisi dan pameran dagang di luar negeri, mempersiapkan keperluan-keperluan pemasaran dalam bahasa asing dan mengedarkan pariwisata mengenai usaha kecil dan menengah ke luar negeri.

Pemerintah-pemerintah negara anggota OECD menyadari bahwa mereka memiliki peran yang besar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah maka mereka memberikan perhatian yang lebih pada upaya-upaya yang bersifat menguntungkan sektor swasta, dimana institusi negara berperan sebagai pelengkap saja.

i. Penilaian kembali atas budaya

Budaya yang perlu dinilai kembali adalah budaya-budaya yang menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah. Banyak kebijaksanaan keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan kebijakan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien bagi usaha kecil dan menengah.

Namun selain itu masih banyak hal-hal lain yang perlu untuk diperbaiki.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara-negara anggota OECD banyak yang bersifat diskriminatif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah menghadapi masalah-masalah untuk memenuhi semua peraturan yang ada dan masalah-masalah tersebut pada akhirnya menjadi hambatan dalam pendirian dan perkembangannya.

Karena kecilnya dana yang dimiliki dan kurangnya sumberdaya manusia, maka usaha kecil dan menengah merasa bahwa ongkos yang harus dikeluarkan untuk memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada sangatlah tinggi dan dari segi formalitas terlalu banyak formulir yang harus diisi. Beberapa peraturan, khususnya yang mengatur tentang hukum ekonomi dianggap dapat mematikan kreativitas usaha kecil dan menengah karena terlalu banyak hal yang dilarang untuk dilakukan oleh sektor usaha kecil dan menengah.

Negara-negara anggota OECD sudah mulai untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada, antara lain dengan cara mengurangi formulir-formulir yang harus dipenuhi, mengurangi birokrasi, mengurangi hambatan-hambatan yang bersifat administrasi, mempersingkat prosedur dan mengurangi ongkos-ongkos yang dibebankan untuk usaha kecil dan menengah. Beberapa negara juga mengambil kebijaksanaan untuk selalu memperhatikan dampak suatu peraturan yang baru ditetapkan bagi usaha kecil dan menengah. Bahkan pendirian “one stop shop” menjadi suatu trend, agar usaha kecil dapat memperoleh informasi mengenai segala persyaratan administrasi pendirian usaha sekaligus melayani formalitas administrasi pendirian usaha.

OECD memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila akan melakukan reformasi hukum untuk usaha kecil dan menengah, yaitu :

- Kebijakan yang mendasari peraturan harus berpandangan ke depan untuk membangun suatu komunitas usaha kecil dan menengah yang besar dan sehat, serta harus memperhatikan sektor-sektor yang lain seperti perpajakan.
- Pembaharuan hukum seyogyanya dengan pendekatan untuk menghasilkan peraturan yang lebih baik.
- Peraturan-peraturan tersebut harus menyediakan suatu ruang dimana usaha mikro , usaha kecil dan usaha menengah dapat berkompetisi secara sehat.
- Peraturan-peraturan yang dapat memberikan dampak pada aspek fleksibilitas kewirausahaan harus mendapat perhatian lebih .
- Peraturan-peraturan yang memberikan dampak kumulatif kepada usaha kecil dan menengah dalam hal hukum dan ekonomi, harus mendapat peraturan yang khusus.
- Perlu dikembangkan suatu kondisi dimana usaha kecil dan menengah selalu dipertimbangkan dalam setiap proses pembentukan peraturan yang memiliki dampak pada usaha kecil dan menengah.
- Semua jenis dan kategori usaha kecil dan menengah baik yang berbasis teknologi maupun yang tidak, berdaya inovasi tinggi dan yang tradisional harus tetap diperhatikan dalam setiap keputusan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendanaan sangat berpengaruh pada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil cenderung untuk membiayai dirinya sendiri yang berasal dari keuntungan atau dari modal sendiri. Peraturan perundang-undangan akan

menentukan tipe-tipe pendanaan yang tersedia untuk pendirian suatu usaha. Beberapa negara mulai membuat suatu peraturan yang bersifat deregulasi terhadap peraturan yang sudah ada mengenai pendanaan antara lain mengenai modal ventura dan pasar modal. Peraturan-peraturan yang telah ada yang dirasakan menghambat keikutsertaan usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan melalui modal ventura , pasar modal dan perbankan mulai diperbaharui.

Selain itu reformasi hukum juga dilakukan pada peraturan yang berhubungan dengan alih teknologi dan hak atas kekayaan intelektual. Disadari bahwa usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan untuk mendapatkan teknologi yang paling muktahir karena keterbatasan dana, maka dibuat suatu program dimana kalangan universtitas dan industrialis untuk dapat mengadakan “*joint research*” dengan sektor usaha kecil dan menengah.

Hak atas kekayaan intelektual bagi kalangan usaha kecil dan menengah merupakan asset yang sangat berharga. Namun usaha untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual semisal hak paten,hak merek, hak atas desain industri , hak cipta merupakan hal yang agak berat untuk dilakukan karena keterbatas dana dan terlalu memakan waktu. Negara-negara anggota OECD menyadari akan hambatan-hambatan tersebut sehingga mereka membuat suatu kebijaksanaan agar pengurusan hak atas kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cepat dan murah.

Hal lain yang direkomendasikan oleh OECD untuk diperhatikan apabila melakukan reformasi peraturan perundangan mengenai usaha kecil dan menengah adalah dalam hal tenaga kerja. Beberapa negara anggota OECD memiliki peraturan-peraturan perburuhan yang dinilai menghambat pendirian dan perkembangan usaha kecil dan menengah. Peraturan-peraturan perburuhan disatu sisi berfungsi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, namun apabila peraturan tersebut terlalu kaku maka akan sulit bagi sektor usaha kecil dan menengah untuk dapat memenuhinya, contohnya peraturan mengenai pengupahan, hak-hak buruh akan fasilitas pensiun, kesehatan dan lain-lain.

Berikut ini adalah beberapa contoh usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara anggota OECD dalam hal penentuan kebijakan mengenai usaha kecil dan menengah , khususnya dalam hal pembaharuan hukum.

Amerika Serikat, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil selama akhir 1990-an ,sangat menyadari akan arti pentingnya usaha kecil dan menengah dalam perekonomiannya. Pemerintah AS mendirikan The Small Business Administration (SBA) sejak 1953, badan ini mempunyai misi untuk membantu , membina dan melindungi kepentingan usaha kecil dan menengah. Sejak 1997 SBA mempunyai beberapa misi khusus,

yaitu meningkatkan kesempatan bagi usaha kecil, menjadikan SBA sebagai lembaga keuangan yang memimpin di era abad 21, membantu usaha dan keluarga untuk bangkit kembali dari kebangkrutan, membimbing usaha kecil untuk dapat berpartisipasi dalam sistem “welfare”, bertindak selaku wakil usaha kecil dan menengah AS. Reformasi hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha kecil dan menengah dilakukan di sektor-sektor hukum perbankan, hukum persaingan usaha, hukum perburuhan, dan hukum imigrasi.

Jerman, mendefinisikan usaha kecil dan menengah sebagai organisasi bisnis dengan tenaga kerja tidak lebih dari 500 orang dan penjualan bersih kurang dari 100 juta DM pertahun, selain itu juga tidak merupakan afiliasi dari usaha besar. Pemerintah Jerman memiliki kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah secara ekonomis. Reformasi hukum mengenai usaha kecil dan menengah dilakukan dalam rangka untuk mengurangi hambatan-hambatan administrasi yang biasa dihadapi usaha kecil dan menengah, antara lain dibidang hukum perpajakan, hukum perburuhan, persyaratan sertifikasi, kewajiban pelaporan statistik dan hukum lingkungan.

Republik Czech, usaha kecil dan menengah ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, antara 25 –250 orang. Pemerintah Czech memandang usaha kecil dan menengah sebagai suatu hal yang penting, karena mereka memainkan peran yang penting dalam proses restrukturisasi dan transisi. Usaha kecil dan menengah bertindak selaku mesin penggerak kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi, serta sebagai sektor penyerap tenaga kerja. Namun usaha kecil dan menengah di Republik Czech menghadapi beberapa masalah antara lain kekurangan modal dan tidak ada lembaga pembiayaan modal ventura, kesulitan untuk masuk ke pasar, harus berkompetisi dengan usaha besar dan barang-barang impor, kurang pengalaman bisnis, kurang pengetahuan mengenai teknologi, dan tidak adanya pelatihan-pelatihan. Maka pembaharuan peraturan mengenai usaha kecil dan menengah ditujukan untuk peningkatan modal , peningkatan ketrampilan, penyediaan konsultasi, kerjasama antar perusahaan, pembangunan lembaga riset dan lain-lain.

Korea, memiliki kategori usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja ,yaitu tidak lebih dari 300 orang. Kebijakan pemerintah Korea terhadap usaha kecil dan menengah ditujukan pada usaha-usaha untuk meningkatkan kompetisi antar mereka, meningkatkan kecanggihan dan nilai tambah industri melalui otomatisasi dan proses yang berdasarkan informasi serta menyediakan pendampingan untuk peningkatan teknologi dan kualitas. Usaha kecil dan menengah didorong untuk mengadakan kerjasama dengan usaha besar dan meningkatkan kompetisi pasar baik di dalam maupun luar negeri.

Jepang, mengakui peran penting dari usaha kecil dan menengah dalam perekonomiannya. Suatu undang-undang mengenai usaha kecil dan menengah yang bersifat pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, diundangkan pada tahun 1999. Undang undang baru tersebut adalah The New Small and Medium Enterprise Basic Law in 1999, berisikan antara lain perubahan definisi usaha kecil dan menengah dengan menaikkan jumlah modal dasar usaha, perubahan disektor perpajakan, mempersingkat prosedur administrasi, deregulasi sektor pasar modal. Tujuan diadakannya pembaharuan hukum usaha kecil dan menengah adalah untuk meningkatkan basis manajemen sektor usaha kecil dan menengah, mendukung reformasi structural usaha kecil dan menengah, pengukuran untuk usaha kecil, survey dan kehumasan. Beberapa peraturan juga diundangkan dalam rangka mendukung pembinaan dan pembangunan usaha kecil dan menengah, yaitu Law for Facilitating the Creation of New Business, The Law of Supporting Business Innovation of Small and Medium Enterprises, The Law Concerning The Promotion of Efficient Distribution System in Small and Medium Enterprises dan lain-lain.

Selain negara-negara anggota OECD, negara-negara anggota ASEAN juga memiliki program-program khusus untuk usaha kecil dan menengah, antara lain yang telah dilakukan oleh Thailand dan Malaysia.

Thailand tidak memiliki definisi yang khusus untuk usaha kecil dan menengah karena banyak definisi yang dianut oleh banyak institusi dan departemen, antara lain Kementerian Industri memberikan definisi usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja dan kekayaan bersih. Usaha kecil dengan tenaga kerja kurang dari 50 orang dan kekayaan bersih kurang dari 20 juta Bath, untuk usaha menengah dengan tenaga kerja antara 50-200 orang dan kekayaan bersih antara 20- 100 juta Bath, dan untuk usaha besar adalah dengan tenaga kerja lebih dari 200 orang dan kekayaan bersih lebih dari 100 juta bath.

The Industrial Finance Corporation of Thailand (IFTC), the Small Industry Finance Corporation (SIFC) dan Bank of Thailand memberikan definisi usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 20 juta Bath. Sedangkan Office of the Board of Investment mendefinisikan usaha kecil dengan kekayaan bersih kurang dari 10 juta Bath dan usaha menengah dengan kekayaan bersih antara 10 – 100 juta Bath.

Pembinaan usaha kecil dan menengah dimulai sejak tahun 1981 sampai sekarang, dengan tekanan utama kebijakan yang bertitiktolak pada pandangan bahwa usaha kecil dan menengah adalah sarana yang efektif untuk pemerataan pendapatan dan mempercepat desentralisasi industrialisasi, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan usaha kecil dan menengah dijalankan secara konsisten dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Beberapa cara yang ditempuh antara lain meningkatkan dan memperluas promosi usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi, menyediakan sistem perkreditan untuk usaha kecil di daerah terpencil, meningkatkan usaha riset atas teknologi untuk produksi dan manajemen, mempromosikan produk-produk melalui sistem subkontraktik antara usaha besar yang terkait dengan usaha kecil .

Secara singkat kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand dalam rangka memajukan dan mendukung usaha kecil dan menengah dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu mempromosikan investasi, asistensi keuangan dan pelatihan teknik dan konsultasi, yang dilaksanakan oleh berbagai institusi

Negara ASEAN lain yang juga memberikan perhatian yang besar kepada usaha kecil dan menengah adalah Malaysia. Usaha kecil dan menengah yang beroperasi dibidang manufaktur adalah berjumlah 80% dari total usaha manufaktur di Malaysia. Strategi pembangunan usaha kecil dan menengah ditekankan pada hubungan yang strategis antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dan memberikan fasilitas kepada usaha kecil dan menengah untuk dapat memasuki pasar ekspor. Strategi-strategi tersebut diimplementasikan melalui program-program antara lain perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal infrastruktur industrialisasi dan mengenai skema pemberian kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah dalam rangka perluasan usaha dan modernisasi usaha.

REVISI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pemerintah Indonesia berencana untuk merevisi peraturan-peraturan perundangan dibidang usaha kecil dan menengah. Revisi tersebut seyogyanya akan dilaksanakan mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya di tingkat kementerian. Hal lain yang patut diperhatikan adalah kesesuaian antar peraturan yang ada, jangan sampai terjadi tumpang tindih dan kesimpangsiuran peraturan, yang pada akhirnya akan merugikan usaha kecil dan menengah.

Revisi tersebut juga memperhatikan kondisi-kondisi terkini dari perkembangan perekonomian baik lokal, nasional, regional dan internasional, selain itu juga harus memperhatikan perkembangan teknologi. Hal lain yang penting diperhatikan adalah mengenai badan-badan baru yang dibentuk sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah serta mengenai otonomi daerah.

Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, seyogyanya dapat lebih meletakkan posisinya pada bidang-bidang koordinasi, dan pengawasan.

Peran pemerintah dalam hal pengawasan meliputi aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya, yaitu ²¹:

1. formulating
2. executing
3. controlling

Ketiga hal ini tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi semuanya menjadi variable pengaruh (independent variable) dan variable terpengaruh (dependent variable). Fungsi formulasi sangat ditentukan dengan model pelaksanaan (executing) ataupun model pengawasan (controlling) yang akan dijalankan, demikian juga sebaliknya.

Fungsi-fungsi pengawasan dan atau pengendalian dilakukan dalam beberapa proses gabungan antara pengawasan dan pengendalian, yang terdiri dari :²²

1. pra pengawasan (preliminary control)
2. pengawasan yang bersamaan (concurrent control)
3. pengawasan umpan balik (feed back control)

Beberapa saran dan masukan mengenai revisi peraturan perundangan dibidang usaha kecil dan menengah :

1. Berdasarkan Keputusan Presiden no 163 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Disebutkan bahwa Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kantor Menekop dan UKM memiliki 5 fungsi dan 12 kewenangan, dimana kesemuanya tersebut bisa dikatakan cukup komprehensif. Akan timbul beberapa pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut, dengan fungsi dan kewenangan yang ada namun dengan kedudukannya yang hanya berupa Kantor Menteri Negara apakah sulit bagi Kantor Menekop dan UKM untuk bertindak maksimal bagi kepentingan usaha kecil dan menengah, terutama bagi upaya-upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah.
2. Keputusan Presiden no 166 tahun 2000 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

²¹ Manullang, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, halaman 12

²² Masykur Wiratno, *Pengantar Kewiraswastaan*, BPF, Yogyakarta, 1996, halaman 271

Departemen, telah didirikan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPS-KPKM). Badan ini memiliki tugas untuk mengembangkan sumberdaya koperasi dan usaha kecil menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dan kewenangan dari BPS-KPKM secara umum berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan mengenai usaha kecil dan menengah. Fungsi dan kebijakan tersebut tidak pada hal-hal yang secara teknis dibutuhkan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Apakah perlu dibentuk suatu badan lagi sebagai suatu badan yang khusus memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan yang diperlukan oleh sektor usaha kecil dan menengah untuk maju bersaing dalam dunia perekonomian yang semakin kompetitif.

3. Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam bidang fungsi, kewenangan dan tugasnya juga belum secara nyata melayani hal-hal yang memang secara spesifik dibutuhkan oleh para pengusaha kecil dan menengah.

Jika hal-hal seperti ini tetap berlangsung, dimana setiap pembentukan suatu badan atau lembaga tidak secara langsung berhubungan dengan hal yang memang dibutuhkan maka badan dan atau lembaga tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4. Pembentukan suatu undang-undang baru mengenai usaha kecil dan menengah.
Usaha kecil dan menengah sebaiknya diatur dalam satu undang-undang secara bersama-sama. Dimana dalam undang-undang tersebut selain secara khusus mengatur mengenai usaha kecil dan usaha menengah akan disebut pula mengenai usaha mikro dan usaha besar. Jadi akan terwujud semacam guidelines yang jelas tentang apa usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
5. Mengenai kriteria untuk jenis-jenis seperti usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangatlah penting untuk segera ditentukan. Ada beberapa pilihan untuk menentukan kriteria, dengan menggunakan kriteria kualitatif dan atau kriteria kuantitatif.

Kriteria kuantitatif memakai jumlah tenaga kerja, nilai dari kekayaan bersih, modal dasar, jumlah saham pemegang saham, penghasilan, dan omzet, atau dapat juga memakai jumlah pagu kredit yang bisa diperoleh.

Kriteria kualitatif memakai standar pada manajemen yang independen, asal modal, daerah operasi, perbandingan dengan jenis usaha sejenis.

6. Saran dan usulan mengenai undang-undang usaha kecil dan usaha menengah :
- a. Didalam undang-undang tersebut disebutkan arti penting keberadaan usaha kecil dan menengah bagi perekonomian Indonesia.
 - b. Disebutkan kewajiban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk membina, membangun dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.
 - c. Untuk selalu mengikutsertakan kepentingan usaha kecil dan menengah disetiap perencanaan kebijakan pemerintahan di segala bidang.
 - d. Memberikan suatu definisi khusus untuk apa yang dimaksud dengan :
 - Usaha mikro
 - Usaha kecil
 - Usaha menengah
 - Usaha besar
 - Koperasi
 - e. Berkaitan dengan definisi adalah mengenai kriteria, harus ditentukan jenis kriteria yang akan dipilih untuk membedakan keempat jenis usaha (usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar). Ada beberapa pilihan kriteria , yaitu dengan menggunakan perpaduan antara:
 - ❖ Jumlah modal dasar, pertimbangan memakai jenis ini adalah karena sektor keuangan khususnya perbankan menggunakan kriteria modal dasar dalam memperhitungkan jumlah kredit pinjaman.
 - ❖ Jumlah tenaga kerja, pertimbangan memakai jenis ini karena lebih memudahkan dalam hal pendataan secara statistik
 - ❖ Jumlah kekayaan bersih (yang dianut oleh UU no 9 tahun 1995)
 - ❖ Jumlah hasil penjualan tahunan

Tidak seperti halnya dengan UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dimana dalam penjelasan pasal 5 diberikan beberapa pengecualian, diharapkan dalam undang-undang yang baru ini tidak akan ada pengecualian dalam penetapan kriteria.

Walaupun penting untuk mendorong perekonomian yang berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan, namun ada baiknya pula apabila tidak membatasi criteria usaha kecil dan usaha menengah hanya pada usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Begitu pula dengan usaha kecil dan usaha menengah yang merupakan afiliasi usaha, tidak perlu ditolak sebagai suatu bagian dari memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah.

Usaha mikro perlu disebutkan dalam undang-undang karena mereka terkadang terlupakan dari segi perlindungan dan pembinaan, padahal jumlah mereka adalah banyak dan merupakan lapisan terakhir dari sistem ekonomi kerakyatan.

- f. Menentukan penghitungan atas nilai kekayaan bersih dan nilai pendapatan tahunan dengan mempertimbangkan aspek inflasi yang akan terjadi.
- g. Perlu untuk menentukan bahwa definisi dan criteria yang tercantum dalam undang-undang ini akan berlaku untuk semua departemen dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah apabila berurusan dengan segala macam kebijakan yang akan berkaitan dengan usaha kecil dan usaha menengah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kerancuan dan beranekaragamnya definisi dan kriteria usaha kecil dan menengah seperti yang selama ini terjadi.
- h. Perlu adanya suatu pasal yang mengatur bahwa usaha kecil dan usaha menengah dalam rangka pengembangannya berhak untuk mempunyai “suara” atau “akses” ke dalam proses penentuan arah kebijakan khususnya kebijakan politik dan perekonomian yang akan berhubungan dengan usaha kecil dan usaha menengah.
- i. Menyebutkan secara tegas jenis-jenis pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, untuk mempermudah pelaksanaannya melalui peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya, antara lain :
 - ❖ Dibidang keuangan
 - Termasuk dalam hal ini adalah mengenai kredit pinjaman bagi usaha kecil dan menengah, perlu dipikirkan pemberian kemudahan dalam hal administrasi pengajuan kredit , dibentuknya suatu lembaga kredit mikro yang akan menampung pengajuan kredit bagi usaha mikro tanpa birokrasi yang berbelit. Dapat pula mengadakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga penjamin kredit khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil.
 - Memperkuat dan memperbaiki operasional lembaga pembiayaan modal ventura, karena jenis pembiayaan ini sangat bermanfaat

bagi pembinaan usaha kecil dan menengah karena tidak semata-mata memberikan modal tetapi juga intervensi manajemen.

- Memperkuat dan memperbaiki kondisi pasar modal sehingga dapat diadakan pasar modal sekunder bagi usaha –usaha menengah untuk melakukan emisi sahamnya di pasar modal.

❖ Dibidang perpajakan

- Adanya pengecualian-pengecualian atas penerapan beberapa jenis pajak untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
- Memberikan nilai batas pajak yang khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil
- Mempermudah prosedur pengisian formulir dan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan pajak, apabila perlu membuat suatu biro khusus dalam kantor pajak yang akan melayani usaha mikro dan usaha kecil.
- Memberikan proteksi-proteksi khusus bagi usaha kecil dan menengah, terutama yang berhubungan dengan ekspor.

❖ Dibidang hukum

- Mempercepat dan mempersingkat proses dan prosedur pengurusan perijinan , lisensi-lisensi, sertifikasi dan prosedur-prosedur lain yang berhubungan dengan hukum.
- Mendorong semakin meningkatnya penghargaan atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di kalangan usaha kecil dan usaha menengah, dengan cara mempermudah mempercepat dan meringankan biaya pengajuan hak cipta, hak merek, hak paten dan lain-lain.
- Sehubungan dengan HAKI, didorong pula berkembangnya pemberian paten sederhana bagi para usaha kecil dan menengah, karena hal ini akan bermanfaat dalam meningkatkan penguasaan teknologi bagi usaha kecil dan menengah.
- Perlu adanya lembaga advokasi bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, baik dalam hal penerapan undang-undang ini, maupun perlindungan atas hal-hal yang lain (perburuhan,

perpajakan, perijinan). Yang perlu diperhatikan adalah penyebaran informasi kepada kalangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah bahwa ada lembaga yang akan mewakili mereka dalam hal legal.

❖ Dibidang manajemen

- Perlu ditegaskan mengenai jenis-jenis pelatihan yang akan disediakan bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dengan memperhatikan bahwa tujuan utama dari pelatihan tersebut adalah bersifat berkelanjutan bukan proyek sesaat dengan tujuan akhir akan meningkatkan kondisi suatu usaha, usaha mikro meenjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha besar.
- Termasuk dalam pelatihan adalah perlunya diadakan suatu pelatihan untuk meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat Indonesia, bisa melalui lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan jaringan komunikasi massa (radio, tv).
- Perlu dibentuknya lembaga konsultasi yang akan menampung kesulitan-kesulitan yang dihadapi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah untuk kemudian memberikan jalan keluar atau menyalurkan keluhan tersebut pada badan / lembaga terkait yang berwenang.
- Memastikan bahwa hak-hak usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah atas fasilitas-fasilitas pelatihan dan lainnya dapat terinformasikan kepada mereka.

❖ Dibidang pemasaran

- Selain adanya pelatihan mengenai pemasaran, perlu juga dibentuk suatu fasilitas yang secara nyata membantu pemasaran produk-produk usaha kecil dan usaha menengah, khususnya yang memiliki orientasi ekspor.

- Perlunya dibentuk suatu biro khusus yang akan menangani prosedur ekspor dan melindungi kepentingan dari usaha kecil dan menengah yang melakukan ekspor .
- Apabila perlu pemerintah dapat melakukan proteksi-proteksi atas jenis komoditi tertentu yang merupakan andalan usaha kecil dan usaha menengah di Indonesia.
- Perlu diperhatikan akan adanya kemungkinan dilakukannya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka perlu diinformasikan kepada para pengusaha kecil dan menengah mengenai konsep-konsep antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya yang telah diatur dalam UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Perlunya usaha kecil dan menengah mendapatkan prioritas dalam *government procurement* namun dengan tetap memperhatikan aspek-aspek persaingan yang sehat.
- Mengembangkan suatu sistem pasar yang wajar bagi usaha kecil dan menengah dengan tidak terlalu memberikan perlindungan (*overprotective*) kepada mereka.

❖ Dibidang teknologi

- Makin meningkatkan penguasaan teknologi kepada usaha kecil dan menengah.
- Mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan dari penguasaan teknologi
- Mendorong kerjasama riset dan pengembangan antara usaha kecil dan usaha menengah dengan sektor-sektor lain , seperti dengan lembaga penelitian universitas, lembaga penelitian milik pemerintah baik pusat dan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan yang dimiliki usaha besar. Dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek penghormatan atas HAKI.

❖ Dibidang informasi

- Memastikan tersedianya suatu sistem jaringan informasi yang akan mempermudah akses bagi usaha mikro, usaha kecil dan

usaha menengah untuk mendapatkan segala macam informasi yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

- Memasyarakatkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi bagi usaha kecil dan usaha menengah, antara lain dengan membuka situs web yang berisikan segala informasi mengenai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Indonesia, dimana situs ini selain dapat bermanfaat bagi kalangan usaha di Indonesia, juga dapat memiliki fungsi pemasaran produk usaha kecil dan menengah di luar negeri.

PENUTUP

Demikianlah beberapa saran dan masukan berkaitan dengan usaha-usaha untuk merevisi peraturan perundangan mengenai usaha kecil dan usaha menengah. Tidak ada tujuan untuk melakukan suatu hal yang bersifat menggurui ataupun memaksakan kehendak, namun yang dilakukan adalah sekedar memberikan masukan dan perbandingan pemikiran, dengan tujuan akhir untuk kemajuan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar di Indonesia. Karena apabila keempat kelompok usaha ini dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, maka niscaya ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap bantuan / hutang luar negeri dapat dikurangi.

Beberapa hal yang layak untuk diperhatikan adalah untuk tidak memperlakukan setidaknya mengurangi perlakuan bahwa usaha kecil dan usaha menengah sebagai obyek. Harus segera dimulai untuk memposisikan usaha kecil dan usaha menengah sebagai subyek, apabila hal ini sudah dilakukan maka diyakini bahwa semua kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah kepada sektor usaha ini akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Sekian dan terima kasih.

*****mt2001*****